

Penyuluhan dan Fasilitasi Pemilihan Umum Bagi Masyarakat Negeri Hatalai

Ronald D. Hukubun¹; Warnesy A. Samangun²; Poppy S. Manila³; Hensly Tahalea⁴; Grisko V. Pattipeilohy⁵; Anastasya Supusepa⁶; Refaldy Siahaya⁷; Sherly Lewerissa⁸

¹⁻⁸ Universitas Pattimura, Kota Ambon

Email : esysamangun@gmail.com

Article History:

Received: 08 November 2023

Accepted: 08 Desember 2023

Published: 31 Desember 2023

Keywords:

Election Socialization, Novice Voters, Facilitation of Population Documents, Hatalai.

Abstract: *Indonesia is known as a multicultural country, where one of the cultures is traditional villages. Maluku is one of the provinces that is still very strong with great traditions and culture that still stands under the name of a traditional country, one of which is Negeri Hatalai. Even though Hatalai Country is still known as a traditional country and is still very strong, Hatalai Country itself cannot be separated from aspects of government administration, one of which is making the elections that will be held a success. It is very important for the public to know about general elections, especially first-time voters. One of the mandatory requirements for a holder of voting rights is ownership of population documents such as a Resident Identity Card (KTP). Thus, education is needed regarding the importance of elections for first-time voters as well as facilitating the creation of population documents considering the geographical conditions of Hatalai Country. This community service uses democratic education methods by means of lectures and discussions. The results of this service activity show that novice voters understand the importance of elections and how to make elections successful as seen from their activeness during the counseling, and are enthusiastic about making population documents, in this case KTP.*

Abstrak Indonesia dikenal dengan negara yang bercorak *multicultural*, dimana salah satu kebudayaannya adalah desa adat. Maluku merupakan salah satu provinsi yang masih sangat kental dengan adat dan budaya yang besar masih berdiri dengan nama negeri adat, salah satunya Negeri Hatalai. Meskipun Negeri Hatalai masih dikenal dengan negeri adat dan masih sangat kental, namun negeri hatalai sendiri tidak terlepas dari aspek administrasi pemerintahan, salah satunya meyukseskan pemilu yang akan diselenggarakan. Sangatlah penting bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai pemilihan umum khususnya pemilih pemula. Salah satu persyaratan wajib bagi seorang pemilik hak suara adalah kepemilikan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan demikian, diperlukan penyuluhan terkait pentingnya pemilu bagi pemilih pemula serta terfasilitasinya pembuatan dokumen kependudukan mengingat kondisi geografis Negeri Hatalai. Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pendidikan demokrasi dengan cara ceramah dan diskusi. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pemilih pemula telah memahami pentingnya pemilu dan cara menyukseskan pemilu yang dilihat dari keaktifan saat penyuluhan berlangsung, serta antusias untuk membuat dokumen kependudukan dalam hal ini KTP.

Kata Kunci: Sosialisasi Pemilu, Pemilih Pemula, Fasilitasi Dokumen Kependudukan, Hatalai.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal dengan negara yang bercorak *multicultural*, multi etnik, agama, ras dan multi golongan (Hadi, 2018). Indonesia juga memiliki berbagai macam kekayaan budaya didalamnya, salah satunya adalah desa adat sebagai sistem pengelompokan sosial (*social alignment*) dengan hukum adatnya (tertulis/tidak tertulis) sebagai instrumen pengawasan

* Warnesy A. Samangun, esysamangun@gmail.com

sosial (*social control*) dalam kehidupan masyarakat hukum adat (Kijlstra, 2014).

Sistem sosial budaya yang berwujud desa adat dan hukum adat inilah yang secara empirik menjadi perisai, pengawal, pemelihara, dan penjaga eksistensi dan keutuhan masyarakat hukum adat di daerah sejak dahulu kala, dari masa sebelum merdeka, pasca kemerdekaan bahkan sampai sekarang. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, harus diakui bahwa unsur pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah masyarakat hukum adat; mereka telah ada jauh sebelum NKRI berdiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat (asas *Ad Prima Facie*). Oleh karena itu, NKRI dibentuk berdasarkan struktur sosial masyarakat asli, dan struktur sosial masyarakat Indonesia yang asli itu adalah desa, dimana desa tersebut tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum adat.

Maluku merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih sangat kental dengan adat dan budaya. Daerah-daerah di Maluku sebagian besar masih berdiri dengan nama negeri adat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa negeri adat merupakan negeri yang dipimpin atau dikepalai oleh Kepala Raja/Bapak Raja. Banyak negeri adat di Maluku yang masih kental dengan adat-istiadatnya, salah satunya Negeri Hatalai.

Negeri Hatalai merupakan negeri adat ber-teung Istana *Silawanabessy*, yang berada di pulau Ambon, di pinggiran kota Ambon yang memiliki jarak kira-kira 5 Km ke arah selatan-kecamatan Letimur selatan, Kota Ambon, Provinsi Maluku (Kijlstra, 2014). Meskipun Negeri Hatalai masih dikenal dengan negeri adat dan masih sangat kental, namun Negeri Hatalai sendiri tidak terlepas dari aspek administrasi pemerintahan yang mewajibkan seluruh unsur masyarakat dalam negeri tersebut harus dan diwajibkan mengikuti dan meyukseskan pemilu yang akan diselenggarakan dikemudian hari.

Pemilihan umum (pemilu) adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, disatu sisi Pemilu juga merupakan suatu arena kompetisi. Menang atau kalahnya suatu kandidat akan ditentukan oleh rakyat dengan menggunakan mekanisme pemungutan suara. Menentukan pilihan dalam pemilu merupakan hak setiap warga negara. Sebagai instrumen yang sangat penting dalam rangka untuk memilih dan ikut menentukan para wakil sekaligus pemimpin rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan, pemilu memberikan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah yang benarbenar dianggap mampu untuk mengaspirasikan kehendak mereka (Syahrizal dkk, 2023).

Sama halnya dengan pengertian pemilu yang terdapat dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang menjelaskan bahwa Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Secara teoritis, pemilihan umum merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia. Sampai sekarang, pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting. Hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan.

Pemilu berfungsi sebagai wujud demokrasi dan salah satu aspek yang penting untuk dilaksanakan secara demokratis. Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan. Namun, tidak semua pemilihan adalah demokratis. Hal ini karena pemilihan secara demokratis bukan sekedar lambang, melainkan pemilihan yang harus kompetitif, berkala, inklusif (luas), dan definitif untuk menentukan pemerintah (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2022). Pemilu merupakan salah satu hal penting yang perlu untuk diketahui dan dipelajari, bagi pemilih pemula hal paling efektif menurut kami dalam mempelajari mengenai pemilu ialah dengan cara penyuluhan atau sosialisasi, Menurut Rush dan Althoff, dengan mengadakan Sosialisasi politik mengenai pemilihan umum akan sangat berpengaruh kuat terhadap keterlibatan warga negara dalam suatu sistem politik yang disebut partisipasi politik. Keberhasilannya juga dapat dilihat pada keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum itu sendiri (Sanit, 1997).

Sosialisasi politik sendiri merupakan suatu transmisi pengetahuan, sikap, nilai, norma dan perilaku esensial dalam kaitannya dengan politik, dengan tujuan agar supaya seseorang mampu berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan politik. Proses sosialisasi politik adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memberikan suatu penanaman atau internalisasi suatu gagasan atau nilai politik kepada masyarakat agar nantinya memunculkan suatu sikap politik (partisipasi) suatu masyarakat atau institusi (Rahman, 2019). Oleh karena itu sosialisasi merupakan langkah awal yang sangat efektif untuk dilakukan, dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menghasilkan dampak positif bagi masyarakat dalam hal mempersiapkan diri sebelum akhirnya berperang dalam pesta demokrasi dalam hal ini pemilihan umum.

Selain pentingnya pengetahuan mengenai pemilu, dalam prakteknya terdapat berbagai hal penting yang harus/wajib dimiliki oleh masyarakat, diantaranya memiliki data kependudukan. Data kependudukan merupakan segala tampilan data penduduk dalam bentuk resmi maupun tidak resmi yang diterbitkan oleh badan-badan pencatatan kependudukan

(pemerintah maupun non pemerintah), dalam berbagai bentuk baik angka, grafik, gambar dan lain-lain (Hastuti, 2020), Dengan kata lain, data kependudukan adalah salah satu informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di seluruh tanah air, tidak saja mempermudah pembuatan data kependudukan secara cepat dan akurat. Data-data yang terangkum dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ini akan dimutakhirkan dan ditertibkan Nomor Induk Kependudukannya oleh Pemerintah Pusat dan segera dicetak Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan (Hastuti, 2020). Maka kegiatan pengabdian ini, menurut sangatlah penting dan sangat membantu masyarakat dalam memenuhi data kependudukan mereka yang rusak, hilang atau bahkan yang baru pertama kali ingin membuatnya.

Sangatlah penting bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai pemilihan umum (pemilu) agar pada pelaksanaannya, masyarakat menjadi paham dan sadar mengenai betapa pentingnya pemberian suara dalam pemilu, sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya dengan baik, serta betapa terbantunya masyarakat teristimewa masyarakat di Negeri Hatalai yang memiliki jarak jauh dari kota ambon (kantor pencatatan sipil) untuk mengurus dan membuat data kependudukan mereka.

Oleh karena itu penulis membuat program kerja untuk dapat memfasilitasi dan memberikan penyuluhan terhadap masyarakat Negeri Hatalai, terkhusus bagi mereka yang baru berusia 17 tahun dan akan mengikuti pemilihan untuk pertama kalinya, maupun mereka yang sudah lebih dari 17 tahun tapi baru pertama kali ingin menggunakan hak suaranya untuk memilih nantinya. Dalam meningkatkan pemahaman mengenai pemilihan umum dan pentingnya suara masyarakat untuk menentukan kesejahteraan masyarakat Negeri Hatalai kedepannya agar terhindar dari persoalan politik yang akan datang ataupun golongan putih. Golongan putih atau biasa disingkat Golput atau abstensi (dari kata bahasa Inggris "*abstain*" yang berarti 'menjauhkan diri') merupakan istilah politik ketika seorang peserta dalam proses pemungutan suara tidak memberikan suara atau tidak memilih satupun calon pemimpin, atau bisa juga peserta yang datang ke bilik suara tetapi tidak ikut memberikan suara hingga prosesi pemungutan suara berakhir. Padahal demokrasi merupakan hal penting dan yang memegang peranan dalam pesta demokrasi itu sendiri ialah Rakyat. Rakyatlah yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa dan negara ini kedepannya. Dengan demikian, penulis mengimplementasikan program kerja ini dengan harapan bahwa ketika mendapatkan penyuluhan mengenai pemilu, masyarakat di Negeri Hatalai dapat lebih bijak dalam menjalani pesta demokrasi dengan memberikan suaranya kepada orang/calon pemimpin masa

depan dengan pikiran yang telah matang, sehingga kesejahteraan dan kebahagiaan dapat diperoleh masyarakat Negeri Hatalai.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat di Negeri Hatalai dilakukan dengan metode penyuluhan dan fasilitasi program pemilihan umum pada program kerja kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Pattimura Angkatan L Gelombang I tahun 2023 dengan dua bentuk kegiatan, yakni Sosialisasi Pemilu Bagi Pemilih Pemula dan Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Masyarakat Negeri Hatalai.

a. Sosialisasi Pemilu Kepada Pemilih Pemula

Kegiatan pengabdian dengan judul “Sosialisasi PEMILU kepada pemilih pemula” dilaksanakan di Negeri Hatalai pada 05 november 2023. Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Baileo Negeri ”Istana Silawanabessy” Negeri Hatalai. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan metode pendidikan demokrasi dengan sistem tanya jawab berbentuk diskusi Penulis melakukan assesmen terhadap masalah yang terjadi di masyarakat, sehingga penulis akan memperoleh informasi mengenai kondisi lingkungan dan meningkatkan pengetahuan peserta terhadap materi yang disampaikan.

Kegiatan pengabdian dalam bentuk sosialisasi dan edukasi menyajikan penyuluhan yang arah pertanyaannya membangun interaksi/argumen antara peserta dan pameri dalam mencari jawaban dan rumusan masalah yang dibahas demi mencari tujuan hasil yang disepakati bersama antar kedua pihak. Kegiatan pengabdian ini menggunakan alat bantu untuk menyampaikan materi sosialisasi berupa laptop, *infocus*, proyektor dan kabel.

b. Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Masyarakat di Negeri Hatalai

Kegiatan selanjutnya yakni “Fasilitasi Pembuatan Data Penduduk Bagi Masyarakat di Negeri Hatalai”. Kegiatan dilaksanakan pada 12 November 2023. Menyadari sungguh bahwa data kependudukan merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh masyarakat, dan dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu kegunaannya sebagai syarat seseorang berpartisipasi dalam pemilu. Seseorang yang ingin memilih diwajibkan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana melalui kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah Negeri Hatalai dan Mahasiswa KKN Hatalai bersama Dinas Kependudukan Kota Ambon. Dinas Kependudukan membantu masyarakat Negeri Hatalai melalui penyediaan fasilitas data penduduk berupa pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP),

Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran (AK), dan Kartu Induk Anak (KIA). Dengan melakukan kerjasama ini, masyarakat dapat lebih mudah dalam membuat data penduduk. Di sisi lain disadari bahwa Negeri Hatalai memiliki jarak yang cukup jauh dengan kantor Dinas Kependudukan Kota Ambon. Kegiatan ini bukan hanya ditujukan bagi masyarakat yang baru pertama kali ingin membuat data penduduk saja, namun berlaku pula bagi masyarakat yang memiliki masalah dalam data penduduknya, seperti kehilangan KTP, KK dan lainnya. Masyarakat yang ingin dilayani data kependudukannya haruslah mendaftarkan diri, setelah itu datanya akan dikirimkan dan dibantu prosesnya oleh para pegawai di Dinas Kependudukan, hingga proses percetakannya selesai.

HASIL

Implementasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini direalisasikan melalui 2 jenis kegiatan, yakni: Sosialisasi Pemilu kepada Pemilih Pemula dan Fasilitasi pembuatan data kependudukan.

A. Sosialisasi Pemilu Kepada Pemilih Pemula

Kegiatan pengabdian dilakukan pada Baileo Negeri Hatalai dengan sasarannya pemuda-pemudi masyarakat Negeri Hatalai. Kegiatan ini dihadiri oleh 36 pemuda/pemudi yang terdiri dari 20 pemuda dan 16 pemudi. Narasumber yang diundang untuk menyampaikan materi berasal dari BAWASLU Provinsi Maluku. Narasumber menyampaikan materi tentang pentingnya pemilihan umum, serta tatacara dalam mengikuti pemilu bagi pemilih pemula di Negeri Hatalai (Gambar 1).



Gambar 1. Proses penyampaian materi sosialisasi

Proses penyampaian materi sosialisasi ini dimulai dengan sesi perkenalan diri oleh pemateri, kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi sosialisasi yang meliputi pengertian pemilihan umum (pemilu), pentingnya pemilu bagi masyarakat, serta tatacara mengikuti pemilu bagi pemilih pemula yang hendak menggunakan hak suaranya untuk memilih nantinya.

Setelah sesi pemaparan materi berakhir, dilanjutkan sesi tanya jawab (diskusi). Mekanisme yang dibangun saat sesi diskusi yaitu pemateri akan memberikan penjelasan dan pemahaman secara langsung atas tanggapan atau pertanyaan yang diberikan oleh peserta. Menurut penuturan para peserta, mereka puas atas setiap penjelasan yang disampaikan oleh pemateri.

Pemuda-pemudi Negeri Hatalai yang dikategorikan sebagai pemilih pemula yakni bagi mereka yang baru berusia 17 tahun diberikan pemahaman tentang latar belakang penyelenggaraan pemilu pemilu, pentingnya pelaksanaan pemilu dalam kehidupan bermasyarakat, serta tatacara memilih pada saat hari pemilihan berlangsung. Setelah berakhirnya sesi tanya jawab, kegiatan ditutup dengan dokumentasi bersama yang dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Proses diskusi dan dokumentasi bersama

B. Fasilitas Pembuatan Data Kependudukan

Kegiatan fasilitasi pembuatan data kependudukan ini dilaksanakan di gedung Badan Usaha Milik Negeri (BUMNEG) Negeri Hatalai. Kegiatan ini dihadiri oleh 52 orang peserta, yang terdiri dari pengurusan pembuatan Kartu Identitas Anak (2 orang), pengurusan pembuatan Kartu Keluarga (14 orang), pengurusan pembuatan Akta Kelahiran (8 orang), pengurusan pembuatan Akta Nikah (2 orang), dan pengurusan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (29 orang).

Kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana melalui kerjasama dengan pemerintah Negeri Hatalai. Kemudian kami mengirimkan surat permohonan bantuan fasilitasi kepada Dinas Kependudukan Kota Ambon. Pihak Dinas Kependudukan memberikan respon positif, dilanjutkan dengan mengirimkan beberapa pegawai kantor Dinas Kependudukan di Negeri Hatalai untuk mengambil data masyarakat yang belum memiliki data kependudukan berupa KTP, KK, Akte Kelahiran serta KIA. Pembuatan data kependudukan ini bukan hanya ditujukan bagi penduduk yang baru mengurus berkas-berkas kependudukannya, namun dibuka ruang bagi para penduduk yang mengalami

kehilangan salah satu dari data kependudukan diatas. Kebutuhan data penduduk ini selanjutnya ditindaklanjuti dan dibuatkan data kependudukannya.



Gambar 3. Proses Pengambilan, dan pembuatan data kependudukan

Pada saat implementasi kegiatan di Negeri Hatalai, dimulai dengan proses registrasi berupa pencatatan identitas masyarakat yang ingin membuat data kependudukannya serta mengambil data diri mereka, kemudian membuat data kependudukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terdapat total penduduk yang melakukan perekaman pembuatan KTP berjumlah 29 orang dengan usia mulai dari 17 sampai lansia.



Gambar 4. Proses Dokumentasi Bersama Pemerintah Negeri dan Para Pegawai Kantor Capil Kota Ambon

Setelah proses pengambilan data selesai dilakukan, maka dilanjutkan dengan sesi dokumentasi bersama para pegawai kantor dinas kependudukan kota Ambon, pemerintah Negeri Hatalai bersama Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Pattimura yang ditempatkan di Negeri Hatalai.

DISKUSI

Penyuluhan melalui kegiatan sosialisasi mengenai pemilu kepada pemilih pemula Negeri Hatalai menunjukkan hasil yang positif kepada pemuda-pemudi Negeri Hatalai. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme selama sosialisasi berlangsung dan semangat dalam pembuatan dokumen kependudukan, dalam hal ini KTP. Kegiatan pengabdian ini dapat membantu pemilih pemula dalam memahami konteks pemilu, pentingnya pemilu bagi

masyarakat, serta bagaimana tata cara memilih dengan baik dan benar.

Dengan adanya sesi tanya jawab, dapat menandakan bahwa para peserta sosialisasi memperhatikan materi yang diberikan dengan baik, sehingga terjadilah sesi diskusi. Hal ini tentu saja membuahkan hasil yang baik, dimana para peserta boleh bertanya hal apa saja yang belum mereka pahami, serta pemateri dapat dengan baik menjelaskan konteks pemilu kepada mereka yang masih belum memahami dengan benar tentang pemilu tersebut. Tidak hanya tata cara dalam melaksanakan pemilu yang baik dan benar.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudirman (2022) yang menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan pemilu bagi pemilih pemula oleh pihak KPU memberikan hasil baik. Hal serupa juga disampaikan oleh Leiwakabessy dkk (2023) yang menyatakan bahwa sosialisasi pemilu sangat berpengaruh dan mempengaruhi signifikansi terhadap partisipasi politik masyarakat.

Di sisi lain, kegiatan pengabdian dengan menghadirkan dinas kependudukan kota ambon di Negeri Hatalai telah membantu masyarakat banyak dalam hal, terutama perihal pembuatan data kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran, dan KIA). Masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor dias kependudukan untuk membuatnya. Akan tetapi, cukup dengan datang ke tempat yang telah di beritahukan yaitu di BUMNEG Hatalai untuk membuat data kependudukan. Masyarakat telah tertolong dengan kehadiran pegawai dinas kependudukan di Negeri Hatalai. Masyarakat dapat melakukan aktifitas seperti biasanya, dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk ke kantor dinas kependudukan.

KESIMPULAN

Penyuluhan dan Fasilitasi data kependudukan bagi masyarakat di Negeri Hatalai merupakan aksi pemberian pemahaman mengenai pentingnya peran rakyat dalam menentukan masa depan Bangsa dan Negara, karena Rakyat merupakan unsur paling penting dalam melakukan pemilihan umum (pemilu), dengan membangun landasan tersebut, kegiatan pengabdian ini pun bermaksud membantu melengkapi kebutuhan masyarakat dalam melengkapi data kependudukannya. Hal ini dilakukan dengan harapan masyarakat dapat memahami dengan baik mengenai peranan pentingnya masyarakat dalam dunia demokrasi melalui pemilihan umum yang nantinya akan dilaksanakan, sehingga kedepannya bisa mengurangi angka masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan haknya untuk memberikan suara dalam proses pemilihan umum, serta harapan yang sangat besar pula bahwa dengan dilakukannya fasilitasi data kependudukan dalam kegiatan pengabdian ini

dapat membantu masyarakat di Negeri Hatalai dalam memenuhi segala kebutuhan data kependudukan mereka.

PENGAKUAN

Terima kasih penulis sampaikan kepada pimpinan Universitas Pattimura dan pengelola Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Pattimura, Pemerintahan Negeri Hatalai dan Masyarakat Negeri Hatalai yang telah berpartisipasi dan menyukseskan kegiatan ini.

DAFTAR REFERENSI

- Ambarwati, Rini, Aidinil Zetra, and Syahrizal. 2023. "Efektivitas Sosialisasi Pemilu 2019 KPU Kabupaten Indragiri Hulu." *Jurnal Niara* 15, no. 3: 571–80. <https://doi.org/10.31849/niara.v15i3.9280>.
- Hadi, Abd. 2018. "Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebagai Implikasi Hukum Setelah Berlakunya Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13: 162–74. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1580>.
- Kijlstra, Paul. 2014. "Kesultanan Dan Kerajaan Indonesia (Hatalai, Kota Ambon)." 2014. <https://sultansinindonesieblog.wordpress.com/maluku/kerajaan-hatalai/>.
- Leiwakabessy, J., Hukubun, R. D., Saija, V. J. E., Haupea, M. L., Masnia. 2023. Peningkatkan Kecakapan Partisipatif Pemilih Pemula Pemilu Di Negeri Hukurila Kota Ambon. *Faedah : Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia*. Vol. 1, No. 3 Hal 16-24 DOI: <https://doi.org/10.59024/faedah.v1i3.223>
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2022. "Pengertian Pemilu". <https://kota-tangerang.kpu.go.id/page/read/37/pengertian-pemilu> .
- Rahman, Ikman Nur. 2019. Universitas Sultan, and Ageng Tirtayasa. "No Title" 4, no. 1: 121–29.
- Sanit, Arbi. 1997. *Partai, Pemilu Dan Demokrasi*. Cetakan Pertama. Pustaka Pelajar: Yogyakarta Hal. 158."
- Sri Handriana Dewi Hastuti. 2020. "Pentingnya Pemanfaatan Data Kependudukan Di Era Digital." *TEKNIMEDIA: Teknologi Informasi Dan Multimedia* 1, no. 1: 18–21. <https://doi.org/10.46764/teknimedia.v1i1.9>.
- Sudirman, Irsyad, and Imam Muazansyah. 2022. "Efektivitas Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Pada Pemilih Pemula Dalam Pemilu Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid 19." *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 5, no. 1: 136–43. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i1.3572>